

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Erwis (2012), yang meneliti tentang “ Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan, menurut Marduati (2012) meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat.

Pramita (2015), mengungkapkan dalam penelitiannya tentang Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif karena tidak ada satupun tingkat efektivitas penagihan pajak berada dalam kriteria efektif yang diatas 60% dan tingkat kriteria kontribusi penagihan pajak tergolong sangat kurang terhadap penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2010-2012 yang belum berada diatas 10%, sedangkan untuk kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 sebesar 13% dan termasuk kriteria kontribusi yang kurang.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU dan para ahli memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

1. Menurut Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) : Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
2. Menurut Waluyo (2008:2) : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
3. Menurut Resmi (2013:1) : Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

4. Menurut Mansury (2002), Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.

Definisi-definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Luran rakyat yang diberikan kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak atau dengan aturan pelaksanaannya.
3. Pajak dapat dipaksakan dalam pemungutannya menurut UU supaya WP memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Tanpa jasa timbal balik (Kontraprestasi) dari Pemerintah secara langsung.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi utama (fiskal) pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Fungsi *budgetair* (pendanaan) adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi mengatur sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi mengatur pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

2.2.3 Jenis – jenis Pajak

Menurut Ilyas dan Suhartono (2007;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut sifatnya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.
2. Menurut Sasarannya
 - a. Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
 - b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah

diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

3. Menurut lembaga pemungutan

- a. Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2.4 Tarif Pajak

Tarif pajak ada 4 macam yaitu :

1. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya (DPP). Tarif tetap di Indonesia diterapkan oleh bea materai.
2. Tarif sebanding (Proporsional), yaitu suatu tarif tertentu berupa persentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun DPP-nya sehingga pajak terutang meningkat apabila DPP meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila DPP menurun. Kenaikan atau penurunan tersebut selalu

proporsional atau sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan oleh PPN dan Pph 26 atas WP Luar Negeri, Pph WP Badan dan beberapa tarif pajak penghasilan final.

3. Tarif degresif, yaitu suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila DPP-nya semakin meningkat. Penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.
4. Tarif progresif, yaitu suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila DPP-nya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Tarif progresif ada 3 jenis yaitu :
 - a. Tarif progresif – proporsional
 - b. Tarif progresif – progresif
 - c. Tarif progresif – degresif.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2008;13) asas – asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas *Equality* (kesamaan atau keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak

atau WP (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat kepada WP walaupun tidak secara langsung.

2. Asas *Certainty* (kepastian)

Penetapan pajak itu dilakukan secara pasti dan tidak sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas *Convenience* (kenyamanan)

Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya tidak dalam kondisi sulit untuk membayar pajak dan lebih baiknya pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan.

4. Asas *Economy* (ekonomis)

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing –

masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis), di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial), sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana karena akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mansury (2002) ada empat sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparaturnya.

2. *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan pada WP meskipun masih ada peran aparat pajak dalam hal WP menyalahi aturan.
3. *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan (Pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

2.2.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu menurut Resmi (2003) :

1. Ajaran material, ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya undang-undang. Tidak ada utang pajak jika tidak ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melakukan intensifikasi pajak atau penggalan potensi pajak termasuk menerbitkan peraturan yang memperluas objek pajak. Ajaran ini sesuai dengan self assesment system.
2. Ajaran formil, ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya surat tagihan atau ketetapan pajak dari Pemerintah. Tidak ada utang

pajak jika tidak ada penagihan atau penetapan oleh Pemerintah. Pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang dan kapan harus membayar pajak. Ajaran ini sesuai dengan official assesment system.

Hapusnya utang pajak atau berakhirnya utang pajak dapat dikarenakan beberapa hal yaitu ;

1. Apabila sudah dilakukan pembayaran pajak, utang berakhir karena adanya pelunasan secara tunai atau dengan penyerahan harta non tunai yang harus disetorkan oleh WP ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Pelunasan pajak tidak dilakukan dengan penyerahan harta non tunai kecuali terhadap WP yang memiliki tunggakan utang pajak yang telah dikenakan penyitaan dan pelelangan atas harta bendanya guna melunasi tunggakan pajak.
2. Apabila dilakukan kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak, bentuk offset atau penandingan karena WP memiliki tagihan kelebihan pembayaran sesuai jenis pajak sedangkan WP tersebut juga memiliki utang atas jenis pajak yang lain. Penyelesaian pajak yang dimaksud adalah dengan mengkompensasikan utang pajak dengan kelebihan pembayaran pajak, setiap ada permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh WP, Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan memenuhinya setelah WP benar-benar tidak memiliki utang pajak.
3. Daluarsa
 - a. Dalam hal tidak diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak maka daluarsanya utang pajak adalah merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU KUP “ Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh WP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak”.

- b. Dalam hal diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak maka daluarsanya utang pajak adalah merujuk pada Pasal 22 ayat (1) UU KUP “hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali (PK).
4. Pembebasan atau penghapusan utang pajak, utang pajak dapat berakhir karena adanya pembahasan atau penghapusan utang pajak oleh Pemerintah (Direktorat Jendral Pajak). Pada Pasal 24 UU KUP “Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Menteri keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena WP telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, WP badan yang telah selesai proses pailitnya, atau WP yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluarsa”. Utang pajak yang terkait dengan penagihan atau penetapan pajak beserta sanksi administrasi juga dapat berakhir karena adanya penghapusan atau pembatalan dari DJP.

2.2.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang – undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.3 Efektivitas

Ada beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Siagian (2001;24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

2.4 Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:752) kontribusi dapat diartikan sebagai sebagai sumbang. Maka, dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan pembayaran tunggakan pajak yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap jumlah total penerimaan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menghitung kontribusi penagihan pajak. Dengan menggunakan IKU maka kontribusi penagihan pajak dapat diketahui.

2.5 Penagihan Pajak

2.5.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Kegiatan penagihan pajak merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh karena itu penagihan merupakan bagian produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak

Dalam penagihan pajak harus tegas, konsisten, dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayarkan hutang pajaknya dan pelaksanaan penagihan pajak dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum bagi WP dan aparatatur pajak.

2.5.2 Dasar Penagihan Pajak

Dalam UU KUP dasar penagihan PPh, PPN dan PPn.BM yaitu :

Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 UU KUP adalah :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Keputusan Pembatalan

- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding
- g. Putusan PK

2.5.3 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Suhartono dan Ilyas dikutip dalam buku

“Ensiklopedia Perpajakan Indonesia” (2010;80) :

Tabel 2.1 : Tindakan Penagihan Pajak

No	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran / surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

Sumber : Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (Ensiklopedia Perpajakan Indonesia)

2.6 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.6.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.6.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku KUP oleh Suhartono dan Ilyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
2. Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.6.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak

menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas penetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan
2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)

- b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)
4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.7 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.7.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu :

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000
 - a. Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak

- b. Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 - c. Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan
2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000
- a. Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa
 - b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak
 - c. Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
 - d. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000
- a. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan
 - b. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif
 - c. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal
 - d. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak

- e. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang
- f. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan
- g. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak
- h. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi
- i. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan
- j. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang – halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2.7.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.7.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2.7.4 Tata Cara Penerbitan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.7.5 Pemberitahuan Surat Paksa kepada Orang Pribadi

1. Penanggung pajak bertempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belum dibagi
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2.8 Daluwarsa Penagihan

2.8.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.8.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.